

**DAMPAK DISKUSI MATAKULIAH POLITIK HUKUM
TERHADAP POLA PIKIR MAHASISWA SEMESTER III (TIGA)
PRODI PPKN KAMPUS STKIP PGRI NGANJUK
SEBAGAI LANGKAH NYATA INTERNALISASI METAMORFOSIS
DINAMIKA BUDAYA POLITIK SANTUN, BERSIH, DAN BERETIKA**

Rengga Yudha Santoso

STKIP PGRI Nganjuk

e-mail: rengga0403@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bermaksud menjelaskan tentang internalisasi budaya politik santun kepada generasi muda melalui pembelajaran PPKn. Budaya politik santun, bersih dan beretika ini diperlukan karena dapat membuat para calon elite politik dimasa depan dapat sekiranya menjauhi sikap dan perbuatan yang dapat merugikan bangsa dan Negara Indonesia. Perlu dilakukan upaya penanaman suatu kesadaran bahwa politik yang hendak diperjuangkan bukan semata-mata politik praktis dan politik kekuasaan, melainkan suatu politik yang mengedepankan budi pekerti luhur (budaya politik ideal), dan PPKn adalah pondasi dari pelaksanaannya tersebut. Akhirnya, budaya politik santun yang akan mencetuskan ide-ide, usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan, memberikan yang terbaik untuk orang lain. Maka pada gilirannya, disimpulkan bahwa peran budaya politik santun, bersih dan beretika dalam rangka memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara menuju Indonesia baru adalah: pertama, etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kedua, perlu dilakukan upaya penanaman suatu kesadaran bahwa politik yang hendak kita perjuangkan bukan semata politik kekuasaan, melainkan suatu politik yang mengedepankan panggilan pengabdian demi kesejahteraan masyarakat luas, dialektika antara partai dan politikus serta masyarakat yang kritis. Ketiga, harus adanya perubahan didalam budaya politik santun, bersih dan beretika ini diperlukan karena dapat membuat para elite politik menjauhi sikap dan perbuatan yang dapat merugikan bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Pola Pikir, Metamorfosis Budaya Politik

Pendahuluan

Rutin setiap tahun munculnya isu PKI dan kebangkitan paham komunisme sering diberitakan di berbagai macam media dan kalangan. Baik dikalangan masyarakat, pejabat, pemerintahan bahkan pelajar dan mahasiswa. Membesarnya isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) seiring semakin dekatnya waktu menuju pilkada serentak 2018 dan pemilihan presiden 2019. Begitu kuatnya stigma PKI ini menjadi senjata sangat ampuh untuk stabilitas pemerintahan, selain untuk menutupi segala lawan politik yang berusaha melucuti kekuasaan yang telah diperolehnya, juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan pihak yang sedang berkuasa saat ini (Budiarjo, 1997: 98). Kemudian, persoalan ini telah mengorbankan dinamika politik yang sehat, yang selanjutnya muncul pribadi-pribadi yang tidak memiliki karakter dalam berpolitik. Saling hujat, saling melakukan fitnah saling menyampaikan berita

yang tidak benar dan lain sebagainya, maka dalam dinamika tersebut jauh dari nilai-nilai karakter yang diharapkan bangsa ini.

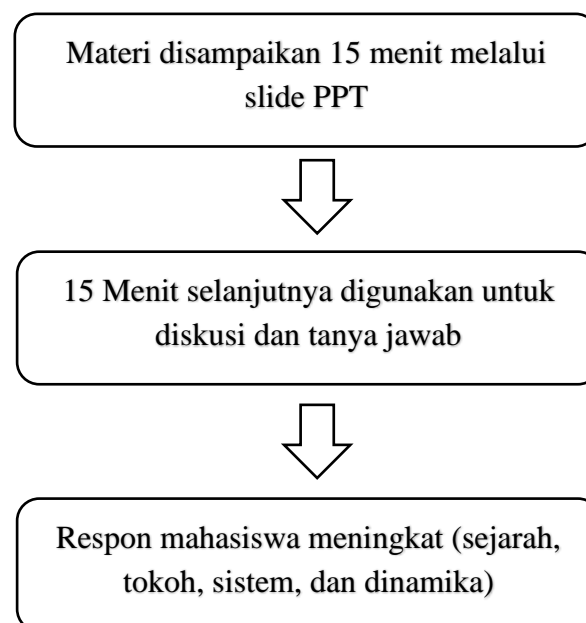
Pada dasarnya adanya pendidikan karakter merupakan kunci yang sangat penting di dalam membentuk kepribadian. Selain di lingkungan keluarga, pendidikan karakter perlu diterapkan di lingkungan sekolah, lingkungan perguruan tinggi dan di lingkungan masyarakat. Karena pada hakikatnya pendidikan memiliki tujuan untuk menjadikan manusia cerdas dan tumbuh menjadi insan yang baik. Dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan atau lebih tepatnya generasi emas, pemerintah Indonesia gencar melaksanakan kegiatan hingga jargon penguatan karakter pada generasi muda agar harapannya memiliki keunggulan dalam hal persaingan global abad 21. Pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIPI) dan mengeluarkan Perpres nomor 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter untuk memberikan kepada generasi muda tidak tergerus nilai-nilai ke-Indonesiannya. Oleh sebab itulah, setiap pemuda Indonesia, baik yang masih berstatus sebagai pelajar, mahasiswa, ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya adalah aktor-aktor penting yang sangat diandalkan sebagai tiang penyangga kokoh bangsa dan Negara untuk mewujudkan cita-cita pencerahan kehidupan bangsa Indonesia di masa depan. Para pendiri negara Indonesia telah meletakkan dasar-dasar dan tujuan kebangsaan sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Didalamnya dimuat tentang kepribadian bangsa. Sebagai generasi muda harapan bangsa, harus pandai menyaring dan menyampaikan informasi agar tidak memunculkan polemik ditengah-tengah masyarakat. Kiranya itulah alasan betapa pentingnya tulisan ini, agar generasi muda masa depan selalu santun dalam berpolitik. Politik yang santun tentu saja arahnya adalah kepada kebaikan. Kebaikan untuk bangsa dan negara ini, untuk semua rakyat Indonesia dan untuk dirinya sendiri. Politik harus memberi keteduhan dan kenyamanan bagi yang terlibat di dalamnya (Buchori, 2000:135).

Selanjutnya adalah permasalahan terkait masih rendahnya kualitas bahkan kuantitas partisipasi politik di Indonesia sebenarnya bertolak belakang dengan potensi bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah negara demokrasi yang besar, maka jika ingin menjadi sebuah negara demokrasi terbesar didunia. Potensi penduduk Indonesia yang perlu diberdayakan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik warga negara ialah generasi muda. Setidaknya ada dua alasan utama yang mendasari, yaitu: *Pertama*, Potensi jumlah pemilih usia muda. Berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) tahun 2019 akhir menunjukkan, jumlah penduduk usia muda di Indonesia adalah sebanyak 62.985.401 jiwa atau 29,5 (%) persen dari total populasi 213,287 juta jiwa penduduk Indonesia. Bahkan jumlah tersebut diperkirakan

masih akan terus bertambah secara signifikan dari tahun ke tahun. Dari segi kuantitas angka tersebut menjadi indikasi betapa potensialnya jumlah pelaku politik usia muda di Indonesia. *Kedua*, Fakta bahwa generasi muda sebagai pelopor gerakan perubahan kearah perbaikan suatu bangsa. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa perintis berbagai gerakan perubahan politik bangsa selalu diawali oleh generasi muda. Perjuangan generasi muda sudah dimulai sebelum hingga mencapai masa kemerdekaan. Bahkan generasi muda menjadi motor utama pada gerakan reformasi yang menggulingkan pemerintahan otoriter orde baru yang telah berkuasa 32 tahun. Karena itu tepat generasi muda dijuluki sebagai “*agent of social change*”, atau generasi yang dapat memelopori suatu perubahan kearah perbaikan suatu bangsa.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan hanya bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui pentingnya pendidikan politik generasi muda terhadap pentingnya budaya politik santun, bersih, dan beretika di lingkungan kampus STKIP PGRI Nganjuk melalui diskusi dalam perkuliahan matakuliah politik hukum di semester III (tiga) prodi PPKn melalui perkuliahan daring.



Fokus Penelitian ini didasarkan pada agen pendidikan politik, yang dimana merupakan sarana pendidikan politik sebagaimana dikemukakan Colin Mac Andrews dan Mochtar Mas' oed diantaranya adalah: keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, lingkungan pekerjaan, media massa, kontak politik langsung. Peran agen terhadap pelaksanaan pendidikan politik generasi muda sebagaimana tertuang dalam Selanjutnya Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda. Dengan demikian fokus penelitian ini diarahkan pada beberapa hal yaitu : a) peran mahasiswa terhadap pelaksanaan pendidikan politik generasi muda dengan metamorfosis pola pikir budaya politik yang semakin maju, b) dampak Pendidikan Generasi Muda politik terhadap pelaksanaan partisipasi politik baik di lingkungan kampus, dan masyarakat dengan bekal organisasi luar kampus. Tempat Penelitian. Penelitian ini dilakukan didalam pelaksanaan perkuliahan daring matakuliah politik hukum semester III (tiga) prodi PPKn STKIP PGRI Nganjuk.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Observasi dan riset, dilakukan dengan pengumpulan hingga penyusunan materi perkuliahan matakuliah politik hukum semester III (tiga) prodi PPKn STKIP PGRI Nganjuk. Pengamatan dilakukan pada pertemuan perkuliahan daring minggu ke-3 (tiga), dimana respon dan keingintahuan mahasiswa terkait materi perkuliahan dan korelasi dengan fakta yang terjadi memunculkan keingintahuan lebih pada mahasiswa tentang budaya politik itu sendiri. (2) Kuesioner, berupa daftar pertanyaan, dilakukan dengan mengedarkan daftar pertanyaan kepada setiap responden yang telah ditentukan untuk di isi atau dijawab sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. (3) Studi Kepustakaan/Literatur, serta berbagai literatur atau sumber bacaan yang relevan dengan masalah penelitian.

Setelah melewati tahapan pengumpulan data yang diperlukan, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka teknik analisa data ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1984) sebagaimana dikutip Sugiyono (2009:91) menyebutkan bahwa, aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisa data deskriptif kualitatif, yaitu reduksi data, display data serta kesimpulan/verifikasi data dimana subjek penelitian diambil dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu berdasarkan hasil respon diskusi, pemahaman materi, hingga jawaban yang diberikan oleh mahasiswa.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Budaya Politik

Konsep budaya politik muncul dan mewarnai wacana ilmu politik pada akhir Perang Dunia II, sebagai dampak perkembangan ilmu politik di Amerika Serikat. Sebagaimana diungkapkan oleh banyak kalangan ilmuwan politik, setelah PD II selesai, di Amerika Serikat terjadi apa yang disebut revolusi dalam ilmu politik, yang dikenal sebagai Behavioral Revolution, atau ada juga yang menamakannya dengan Behavioralism. Behavioral revolution yang terjadi dalam ilmu politik adalah sebagai dampak dari semakin menguatnya tradisi atau madzhab positivisme, sebuah paham yang percaya bahwa ilmu sosial mampu memberikan penjelasan akan gejala sosial termasuk ilmu politik, seperti halnya ilmu-ilmu alam mampu memberikan penjelasan terhadap gejala-gejala alam. Paham ini sangat kuat diyakini oleh tokoh-tokoh besar sosiologi, seperti Herbert Spencer, Auguste Comte, juga Emile Durkheim (Afan Gaffar, 2004: 97).

Budaya politik merupakan pola perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya (Rusadi Kantaprawira, 2006: 25). Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Budaya Politik menjadi penting untuk dipelajari dan dipahami karena ada dua sistem. *Pertama*, sikap warga negara terhadap orientasi politik yang menentukan pelaksanaan sistem politik. Sikap dan orientasi politik sangat mempengaruhi bermacam-macam tuntutan, hal yang diminta, cara tuntutan itu di utarakan, respon dan dukungan terhadap golonganm elit politik, respons dan dukungan terhadap rezim yang berkuasa. *Kedua*, dengan mengerti sifat dan hubungan antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sistemnya, kita akan lebih dapat menghargai cara-cara yang lebih membawa perubahan sehingga sistem politik lebih demokratis dan stabil (A. Rahman H.I, 2007: 269). Budaya politik selalu inheren pada setiap masyarakat yang terdiri dari sejumlah individu yang hidup dalam sistem politik tradisional, transnasional, maupun modern. Orientasi politik tersebut dapat dipengaruhi oleh orientasi individu dalam memandang obyek-obyek politik. Almond dan Verba (1984: 16) mengajukan klasifikasi tipe-tipe orientasi politik, yaitu: 1) Orientasi kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik dan

atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lagu kebangsaan negara. 2) Orientasi afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranannya yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu. 3) Orientasi evaluatif, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Perlu disadari bahwa dalam realitas kehidupan, ketiga komponen ini tidak terpisahkan-pisahkan tetapi saling terkait atau sekurang-kurangnya saling mempengaruhi. Semisal seorang warga negara dalam melakukan penilaian terhadap seorang pemimpin, ia harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang si pemimpin. Dalam konteks Indonesia, kiranya jelas bahwa yang dihadapi tidak hanya kemajemukan etnik dan daerah, tetapi pada saat yang bersamaan adalah "sub-budaya etnik dan daerah" yang majemuk pula. Keanekaragaman tersebut akan membawa pengaruh terhadap budaya politik bangsa. Dalam interaksi di antara sub-sub budaya politik kemungkinan terjadinya jarak, tidak hanya antar budaya politik daerah dan etnik, tetapi juga antar budaya politik tingkat nasional dan daerah. Apabila pada tingkat Nasional yang tampak lebih menonjol adalah pandangan dan sikap di antara sub-sub budaya politik yang berinteraksi. Namun pada tingkat daerah yang masih berkembang adalah "sub-budaya politik" yang lebih kuat dalam arti primordial.

Metamorfosa Pola Pikir Mahasiswa Tentang Politik Santun, Bersih, dan Beretika

Yosep (2016) memberikan penjelasan bahwa untuk membangun sendi-sendi/prinsip-prinsip berpolitik secara santun dapat dibangun dari pelbagai pemikiran filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles dapat dijadikan rujukan berpikir. Socrates seorang filsuf yang mendasarkan pemikiran politiknya pada nilai-nilai kesantunan. Di samping itu Socrates juga menjelaskan bahwa politik adalah *the art of the possible*. Pemikiran politiknya merujuk pada konsep pembangian kekuasaan yang ideal, mengutamakan kepentingan umum, dan kesejahteraan rakyat. Berpolitik santun ala Socrates selalu mendasarkan motif dengan keutamaan moral. Intinya, berpolitik secara santun berarti selalu berorientasi hanya pada kemaslahatan rakyat dan kemajuan negara. Begitu pula ketika merujuk pada pemikiran Plato, yang mana Plato mendasarkan pada prinsip membangun masyarakat adalah hal yang utama dan politik adalah jalan menuju *perfect society*.

No.	Deskripsi	Kehadiran	%
1	Total Mahasiswa	27	100%
2	Total Respon Keaktifan	11	89%
3	Total Respon Pasif	16	11%

Dari hasil KBM (kegiatan belajar mengajar) yang dilakukan secara daring matakuliah politik hukum mahasiswa semester III (tiga) kampus STKIP PGRI Nganjuk dipastikan bahwa tingkat keingintahuan mahasiswa terhadap dinamika politik di Indonesia mayoritas relatif aktif (tinggi) 89% dari 27 (dua puluh tujuh) mahasiswa . Hal ini dipastikan bahwa ketika KBM berlangsung dosen memberikan materi beserta sinkronisasi terhadap fakta yang terjadi, baik sejarah, korban, dan saat budaya politik saat ini. Kemudian data 11% menunjukkan bahwa sebenarnya mahasiswa yang pasif mengerti dan bisa memahami baik materi yang disampaikan hingga penjelasan dinamika politik di Indonesia, namun terkendala didalam penyampaiannya saja yaitu mahasiswa tidak berani, kurang percaya diri, takut salah untuk menanyakan/ menyampaikan argumentasinya.

Maka dari itu perlu langkah nyata dalam berpolitik secara santun yang harus didasari oleh prinsip perinsip yang jelas agar tidak menimbulkan bias kesantunan politik. Prinsip politik santun dapat berjalan jika setiap pasangan calon menanamkan prinsip objektivitas, rendah hati dan *open mind*, baik dalam pemilu dilingkungan kampus hingga pemilu Nasional. Cara-cara berpolitik santun harus dikembangkan dan disampaikan kepada masyarakat, terutama pada generasi muda agar nilai ke-Indonesiannya tidak hilang. Untuk itu, pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIPI) dan mengeluarkan Perpres nomor 87/2017 tentang Pendidikan tentang Penguatan Pendidikan Karakter untuk memberikan kepada generasi muda tidak tergerus nilai-nilai ke-Indonesiannya. Nilai-nilai ke-Indonesiaan, yakni nilai kesopanan, kesantunan, semua terkandung dalam ideologi Pancasila harus terus disampaikan pada generasi muda, bagaimana mengenai kerukukanan, bagaimana persaudaraan, bagaimana mengenal dan memahami arti toleransi.

Saat ini banyak generasi muda/mahasiswa yang belajar tidak hanya di bangku perkuliahan saja namun dengan mengikuti organisasi mereka pun bisa belajar dan berinteraksi dengan mahasiswa lain dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Kehidupan mahasiswa sudah seharusnya tidak hanya duduk manis di kelas dan berorientasi pada *hard skill*

saja tetapi juga memerlukan *soft skill* untuk menyeimbangkannya. Kehidupan mahasiswa menyimpan jutaan peluang dan tantangan. Banyak sekali hal yang bisa digali saat kita memiliki kartu identitas mahasiswa. Kita bisa bertemu dengan tokoh dan sosok yang luar biasa, dari mulai sesama mahasiswa, lalu dosen, pejabat, peneliti, aktivis, praktisi, akademisi, pengusaha, dan lain-lain. Organisasi adalah tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terkendali, dengan memanfaatkan sumber daya (dana, material, lingkungan, metode, sarana, prasarana, data) dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama (Dewey, 1961: 221).

Dengan mengikuti suatu organisasi kemahasiswaan, kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat, dan hal tersebut bisa menjadi pengalaman tersendiri dalam mejalani studi serta sebagai bekal dalam mencari sebuah pekerjaan. Berikut adalah manfaat ketika kita mengikuti suatu organisasi kemahasiswaan: (1) Tercapainya sebuah tujuan; (2) Melatih mental berbicara di depan publik (*Public Speaking*). (3) Mudah memecahkan masalah (*Problem Solving*). (4) Melatih *Leadership*. (5) Memperluas Jaringan atau *Networking*. (6) Meningkatkan wawasan dan pengetahuan. (7) Membentuk karakteristik seseorang. (8) Kuat dalam menghadapi tekanan dan mampu mengatur waktu dengan baik. (9) Sebagai ajang pembelajaran kerja yang sesungguhnya. (10) Menambah nilai plus CV pada saat melamar pekerjaan.

Maka dari beberapa manfaat tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa seorang mahasiswa yang luar biasa tidak hanya mengembangkan kemampuan *hard skill* saja tetapi juga mau dan mampu mengembangkan kemampuan *soft skill*. Oleh karena itu, dengan adanya organisasi di dalam maupun diluar kampus kita diajak untuk mengembangkan *soft skill* yang sebenarnya sudah dimiliki setiap mahasiswa tergantung bagaimana cara kita mengembangkannya.

Oleh karena itu perlunya metamorfosa terhadap *mind set* budaya politik seperti dalam penerapannya politik santun, bersih dan beretika merupakan metamorfosa penggambaran cita-cita bangsa dan demokrasi yang ideal. Demokrasi yang substansi perlu etika, lebih dari tata cara dan prosedur. Perkembangan kehidupan demokrasi yang santun dan beretika akan memberikan kontribusi pada pengembangan kehidupan bernegara dan berbangsa. Kemajuan demokrasi akan runtuh jika tidak diikuti kehidupan demokrasi yang santun dan beretika. Fenomena kebebasan yang kebablasan terlihat jelas ketika dalam konteks pertarungan politik terlihat adanya pembunuhan karakter diantara pasangan calon yang ada. Tentu hal tersebut menimbulkan efek yang negatif khususnya kepercayaan publik di negeri ini. Untuk menghindari efek negatif tersebut setiap politisi haruslah mengedepankan politik secara santun. Membangun

prinsip-prinsip berpolitik secara santun dapat dibangun dari pelbagai pemikiran filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles dapat dijadikan rujukan berpikir.

Dalam proses pembelajaran, tahapan internalisasi yang dikaitkan dengan budaya politik santun, ada tiga tahap yang mewakili proses atau tahap terjadinya internalisasi, yaitu (Muhaimin, 1996:153) : (1) Tahap Transformasi Nilai : Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal. (2) Tahap Transaksi Nilai : Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau komunikasi yang bersifat interaksi timbal-balik. (3) Tahap Transinternalisasi : Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi. Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal tapi juga sikap mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini komunikasi kepribadian yang berperan secara aktif.

Maka hal ini sejalan dengan pemikiran Socrates seorang filsuf terkait dengan mendasarkan pola pemikiran politiknya pada nilai-nilai kesantunan. Di samping itu Socrates juga menjelaskan bahwa politik adalah *the art of the possible*. Pemikiran politiknya merujuk pada konsep pembangian kekuasaan yang ideal, mengutamakan kepentingan umum, dan kesejahteraan rakyat. Berpolitik santun ala Socrates selalu mendasarkan motif dengan keutamaan moral. Intinya, yaitu bahwa “berpolitik secara santun berarti selalu berorientasi hanya pada kemaslahatan rakyat dan kemajuan negara”. Begitu pula ketika merujuk pada pemikiran Plato, yang dimana Plato mendasarkan pada prinsip membangun masyarakat adalah hal yang utama dan politik adalah jalan menuju *perfect society*. Seperti halnya Socrates yang juga menjelaskan terkait penanaman sebuah nilai bahwa “tidak semua kebenaran itu bersifat relatif namun banyak diantaranya bersifat absolut“. Kemampuan untuk melihat kebenaran secara objektif mampu menjadi prinsip awal berpolitik secara santun, bersih, dan beretika. Kemudian, setiap kandidat harus menanamkan rasa rendah hati, yang artinya dalam bahasa jawa “tepo slira/tidak mau menang sendiri”, dan perbedaan pendapat itu wajar, namun jangan sampai adanya pemaksaan kehendak. Kemudian sikap rendah hati dapat menghindari pasangan calon dari sifat sombong dan angkuh. Prinsip yang terakhir adalah *open mind*, memiliki pengertian mampu berpikir terbuka sehingga mau menerima pendapat ataupun kritik dari berbagai pihak termasuk dari lawan politik sekalipun (Kartono, 1989: 76).

Dari uraian penjelasan diatas maka mengedepankan politik secara santun, bersih, dan beretika sejatinya memiliki pengertian saling berlomba menjadi yang terdepan “*number one, best leader, and best equal*“ dalam memperjuangkan setiap hak dan kebenaran yang dipercayakan sebagai bentuk integritas dalam hal kapabilitas seseorang, maka tentunya, hak

dan kebenaran tersebut seharusnya bukan mengenai jabatan atau kedudukan, melainkan sebuah kemaslahatan bersama, dan siapapun yang menjadi pemenang dalam pertarungan politik harus senantiasa menanamkan budaya politik santun, bersih, dan beretika karena politik sangat erat kaitannya dengan sebuah kebijakan. Kemudian menanamkan hingga melaksanakan budaya politik santun, bersih, dan beretika juga merupakan salah satu cara dalam meredam konflik, baik konflik tingkat internal perguruan tinggi dalam hal kebijakan, konflik pada masyarakat akar rumput hingga elit politik. Santun, bersih, dan beretika dalam berpolitik niscaya akan mendapatkan dukungan baik dari simpatisannya hingga masyarakat.

Maka, dengan metode/penerapan internalisasi ini merupakan sebuah sentral proses perubahan kepribadian yang merupakan dimensi kritis pada perolehan atau perubahan diri manusia, termasuk di dalamnya pemribadian makna (nilai) atau implikasi respon terhadap makna. Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam proses penanaman budaya politik santun kepada generasi muda dengan proses pendidikan budaya dan karakter bangsa mengusahakan agar generasi muda mengenal dan menerima nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Dengan prinsip ini, generasi muda dapat belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan generasi muda dalam berpolitik dan mendorong mereka untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk sosial. Dengan begitu, penanaman budaya politik santun tersebut akan: *Pertama*, mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif generasi muda sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang santun. *Kedua*, Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religious. *Ketiga*, Mengembangkan kehidupan budaya politik yang jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (Bambang Trisno, 2019).

Simpulan, dan Rekomendasi

Pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIPI) dan mengeluarkan Perpres nomor 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter untuk memberikan kepada generasi muda tidak tergerus nilai-nilai ke-Indonesiannya. Dalam pembukaan UUD 1945. Didalamnya dimuat tentang kepribadian bangsa. Sebagai generasi muda harapan bangsa, harus pandai menyaring dan menyampaikan informasi agar tidak

memunculkan polemik ditengah-tengah masyarakat. Kiranya itulah alasan betapa pentingnya tulisan ini, agar generasi muda masa depan selalu santun dalam berpolitik. Politik yang santun tentu saja arahnya adalah kepada kebaikan. Kebaikan untuk bangsa dan negara ini, untuk semua rakyat Indonesia dan untuk dirinya sendiri. Politik harus memberi keteduhan dan kenyamanan bagi yang terlibat di dalamnya (Buchori, 2000:135).

Politik menjadi penting untuk dipelajari dan dipahami karena ada dua sistem. *Pertama*, sikap warga negara terhadap orientasi politik yang menentukan pelaksanaan sistem politik. Sikap dan orientasi politik sangat mempengaruhi bermacam-macam tuntutan, hal yang diminta, cara tuntutan itu di utarakan, respon dan dukungan terhadap golongan elit politik, respons dan dukungan terhadap rezim yang berkuasa. *Kedua*, dengan mengerti sifat dan hubungan antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sistemnya, kita akan lebih dapat menghargai cara-cara yang lebih membawa perubahan sehingga sistem politik lebih demokratis dan stabil (A. Rahman H.I, 2007: 269).

Socrates seorang filsuf yang mendasarkan pemikiran politiknya pada nilai-nilai kesantunan. Di samping itu Socrates juga menjelaskan bahwa politik adalah *the art of the possible*. Pemikiran politiknya merujuk pada konsep pembangian kekuasaan yang ideal, mengutamakan kepentingan umum, dan kesejahteraan rakyat. Berpolitik santun ala Socrates selalu mendasarkan motif dengan keutamaan moral. Intinya, berpolitik secara santun berarti selalu berorientasi hanya pada kemaslahatan rakyat dan kemajuan negara. Begitu pula ketika merujuk pada pemikiran Plato, yang mana Plato mendasarkan pada prinsip membangun masyarakat adalah hal yang utama dan politik adalah jalan menuju *perfect society*.

Dari hasil KBM (kegiatan belajar mengajar) yang dilakukan secara daring matakuliah politik hukum mahasiswa semester III (tiga) kampus STKIP PGRI Nganjuk dipastikan bahwa tingkat keingintahuan mahasiswa terhadap dinamika politik di Indonesia mayoritas relatif aktif (tinggi) 89% dari 27 (dua puluh tujuh) mahasiswa . Hal ini dipastikan bahwa ketika KBM berlangsung dosen memberikan materi beserta sinkronisasi terhadap fakta yang terjadi, baik sejarah, korban, dan saat budaya politik saat ini. Kemudian data 11% menunjukkan bahwa sebenarnya mahasiswa yang pasif mengerti dan bisa memahami baik materi yang disampaikan hingga penjelasan dinamika politik di Indonesia, Oleh karena itu perlunya metamorfosa terhadap *mind set* budaya politik seperti dalam penerapannya politik santun, bersih dan beretika merupakan metamorfosa penggambaran cita-cita bangsa dan demokrasi yang ideal.

Daftar Pustaka

- Afan Gaffar. 2004. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A. Rahman.H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Buchori, Mochtar. (2000). *Peranan Pendidikan Dalam Pembentukan Budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta:Kanisius.
- Budiarjo, Mariam. (1997). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Dewey, John. (1961). *Democracy and Education: Introduction to the Philosophy of Education*. New York: Mac Millan Company.
- Johnson, Doyle P. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid 1 dan 2. Diterjemahkan oleh Robert M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia.
- Kantraprawira Rusadi. 2006. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kartono, Kartini. (1989). *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Perpres nomor 87/2017 tentang *Penguatan Pendidikan Karakter*.
- Tilaar, H.A.R. (2002). *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widjaya, A. (1982). *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.